

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI 2017

<http://www.wakato>





# **INDIKATOR**

## **KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **KABUPATEN WAKATOBİ 2017**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI 2017

No. Publikasi : 74070.1819  
Katalog BPS : 4102004.7407  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 86 halaman

Naskah :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.*

# KATA PENGANTAR

**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi yang memberi gambaran secara umum tentang perkembangan sosial demografi, dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Wakatobi tahun 2017 dengan melihat berbagai indikator yang mempengaruhi.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Selain itu, publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan sebagai sarana untuk meninjau, memantau, atau mengevaluasi hasil pembangunan.

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada BPS sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini.

Wangi-wangi, Desember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Wakatobi



**Ade Ida Mane, SST, M.Si**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Singkatan dan Akronim	v
Bab 1      Kependudukan	1
Bab 2      Kesehatan dan Gizi	14
Bab 3      Pendidikan	23
Bab 4      Ketenagakerjaan	31
Bab 5      Taraf dan Pola Konsumsi	42
Bab 6      Perumahan dan Lingkungan	47
Bab 7      Kemiskinan	57
Lampiran	62
Sumber Data	78

## SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

# **BAB 1**

# **KEPENDUDUKAN**

<https://wakatobib.bp.go.id>

Bahasan tentang kependudukan tentu tak akan bisa lepas dan akan selalu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk dapat dinilai dari dua sudut pandang yaitu dapat dinilai sebagai modal dasar dalam pembangunan, namun, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dibarengi dengan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan.

*Besarnya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah di waktu mendatang*

Mencapai kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tercatat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa indikator tercapainya kesejahteraan penduduk diantaranya yaitu tersedianya pangan yang cukup, pemukiman yang layak huni dan cukup, terciptanya rasa aman dari gangguan kriminalitas, dan tingkat kesehatan yang baik didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Semakin banyak jumlah penduduk tentu akan semakin besar beban yang ditanggung demi terwujudnya indikator-indikator tersebut.

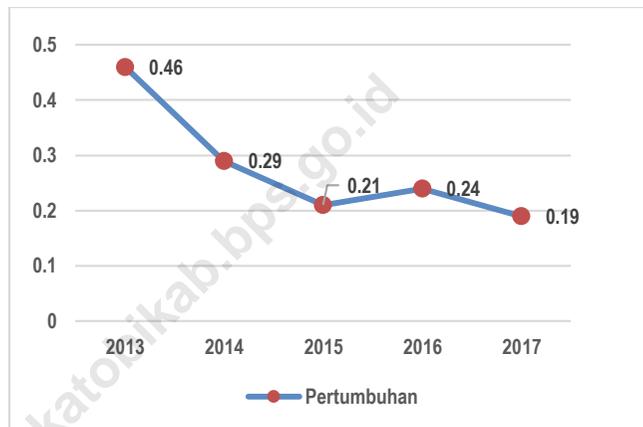
### **Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Oleh karenanya, pembahasan mengenai jumlah penduduk tidak akan pernah lepas dan saling terhubung ketika membahas mengenai masalah kependudukan. Wakatobi sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sebesar 95.209 jiwa atau hanya sekitar 7,42 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016.

Dari tahun ketahun jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi selalu mengalami pertumbuhan. Tiap tahunnya pertumbuhan penduduk berada pada rentang 0,20 hingga 0,50 persen. Pada tahun

2017, jumlah penduduk yang semula 95.209 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 95.386 jiwa atau tumbuh sebesar 0,19 persen jika dibandingkan tahun 2016. Apabila ditotal, lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tumbuh sebesar 1,57 persen dibandingkan tahun 2012.

**Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Wakatobi tahun 2013-2017**



*Pertumbuhan penduduk yang terkendali dibutuhkan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang memadai*

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi merupakan Kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan penduduk terendah. Meskipun masalah seringkali dibahas mengenai dampak yang akan timbul apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun apabila pertumbuhan penduduk rendah juga perlu diperhatikan mengingat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dibutuhkan sumber daya manusia.

Oleh karenanya, pertumbuhan penduduk sebenarnya penting. Namun, perlu diperhatikan besarnya agar kedepan pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal untuk pembangunan ekonomi. Bukan malah menjadi masalah dikemudian hari.

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya persentase *dependency ratio* semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Tahunan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2013	94 511	0,46	92,15
2014	94 789	0,29	92,36
2015	94 985	0,21	92,38
2016	95 209	0,24	92,46
2017	95 386	0,19	92,27

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Wakatobi, pada tahun 2017 yaitu sebesar 92,27. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 92 hingga 93 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

**Tabel 1.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Wakatobi tahun 2017**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0-14	15 566	15 180	102,54
15-64	27 276	30 339	89,90
65+	2 933	4 092	71,68

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020

Apabila dilihat lebih mendalam, diperoleh bahwa pada kelompok umur 0-14 tahun rasio jenis kelamin lebih besar daripada 100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Lebih tepatnya sebesar 102,54 yang artinya setiap 100 anak perempuan terdapat

102 hingga 103 anak laki-laki. Hal ini menandakan bahwa kelahiran anak laki-laki lebih banyak dari kelahiran anak perempuan.

Berbeda dari kelompok usia 0-14 tahun, kelompok usia 15-64 tahun dan 65+ memiliki nilai rasio jenis kelamin kurang dari 100 yang artinya jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun kelahiran laki-laki tinggi namun, angka harapan hidup laki-laki masih tergolong rendah. Sehingga diperjalanan waktu jumlah laki-laki lebih rendah daripada jumlah perempuan.

### **Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan**

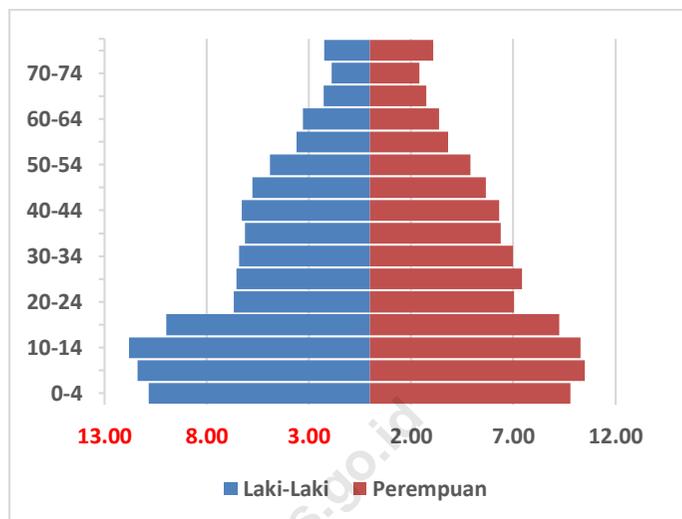
Dari gambar piramida penduduk dapat dilihat bahwa bentuk piramida semakin mengerucut dipuncak. Hal ini menandakan bahwa penduduk Wakatobi didominasi oleh penduduk usia muda. Penduduk usia 0-20 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah terbanyak. Tingkat kelahiran dari tahun ketahun mulai mengalami penurunan. hal ini dapat dilihat dari, kelahiran anak laki-laki yang mengalami penurunan semenjak 15 tahun yang lalu, sedangkan kelahiran perempuan mulai mengalami penurunan semenjak 5 tahun yang lalu.

Struktur umur dapat digunakan pula untuk mengetahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk yang produktif secara ekonomis (usia 15-64 tahun). Semakin besar persentase penduduk yang berusia non produktif, maka makin besar pula angka beban ketergantungannya.

Struktur usia penduduk Wakatobi didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini cenderung menguntungkan karena angka ketergantungan akan menurun pada periode 10 tahun mendatang. Namun, jika hal ini tidak diatasi akan menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan pada periode tertentu.

*Struktur umur dapat digunakan pula untuk mengetahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk yang produktif secara ekonomis (usia 15-64 tahun). Semakin besar persentase penduduk yang berusia non produktif, maka makin besar pula angka beban ketergantungannya.*

**Gambar 1.2 Piramida Penduduk Wakatobi tahun 2017**



Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020

Struktur usia penduduk Wakatobi didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini cenderung menguntungkan karena angka ketergantungan akan menurun pada periode 10 tahun mendatang. Namun, jika hal ini tidak diatasi akan menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan pada periode tertentu.

### **Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama**

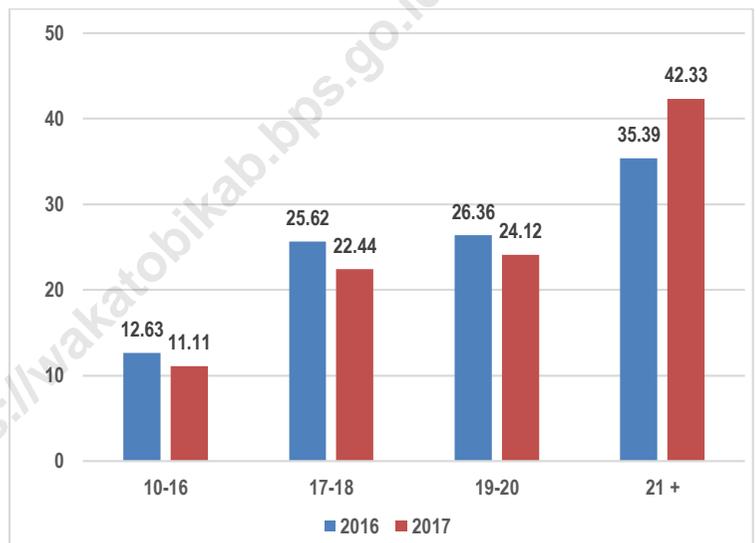
Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1),

syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

**Gambar 1.3 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Wakatobi tahun 2016– 2017**

*Menurut Undang-Undang Per-kawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun.*



Sumber : Susenas 2016 dan 2017 (diolah)

Pada tahun 2017, umur perkawinan pertama tertinggi pada perempuan berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin di Kabupaten Wakatobi berada pada kisaran umur lebih dari 21 tahun dengan persentase sebanyak 42,33 persen. Sementara di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2016 umur perkawinan tertinggi juga terdapat pada kisaran umur 21 tahun keatas namun, terjadi peningkatan persentase yang sebelumnya sebesar 35,39 persen pada tahun 2016 menjadi 42,33 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pola pernikahan dini yang ada dimasyarakat kini

mulai bergeser. Hal ini baik dikarenakan di usia 21 tahun ke atas seorang perempuan relatif lebih ideal untuk menanggung masa reproduksi dibandingkan kelompok umur yang lebih muda. Meskipun demikian, persentase perempuan dengan usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun justru mengalami peningkatan dari 15,94 persen di tahun 2015 menjadi 18,48 persen di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan bertambahnya perempuan yang memutuskan untuk memasuki masa reproduksi pada usia muda. Fenomena ini perlu ditekan keberadaannya, karena selain dapat memicu tingginya angka fertilitas, perempuan yang memasuki masa reproduksi pada usia yang terlalu muda akan menghadapi risiko yang cukup besar, baik pada masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas.

### **Status Perkawinan**

*Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.*

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati. Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Lebih dari setengah atau lebih tepatnya 54,69 persen penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 berstatus kawin. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase status perkawinan perempuan yang berstatus kawin lebih besar daripada laki-laki yang berstatus kawin, artinya lebih banyak penduduk laki-laki yang belum kawin jika dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih kecil dibanding perempuan. Pada tahun 2017 ada sekitar

3,20 persen penduduk laki-laki yang menduda, sedangkan penduduk perempuan yang menjanda sekitar 11,32 persen.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dan kini, tujuan program tersebut telah berkembang lebih luas yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran anak merupakan usaha konkrit dalam merealisasikan tujuan tersebut. Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (20-35 tahun bagi perempuan) akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara jumlah kelahiran yang terbatas (cukup dua anak saja) membuat perhatian ibu terhadap anak-anaknya semakin besar. Dengan demikian diharapkan akan lahir generasi baru yang lebih berkualitas.

**Tabel 1.3 Persentase Penduduk 10 tahun keatas menurut Status Perkawinan Kabupaten Wakatobi, 2017**

Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Belum Kawin	41,16	31,00	35,80
Kawin	54,69	56,18	55,47
Cerai Hidup	0,95	1,50	1,24
Cerai Mati	3,20	11,32	7,48

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Pengaturan jarak kelahiran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memakai alat kontrasepsi. Sedangkan pendewasaan usia perkawinan pertama dapat dilakukan dengan cara mencegah perkawinan dini dan pemberlakuan peraturan tentang umur perkawinan menikah.

## FERTILITAS

Fertilitas merupakan salah satu komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Tentunya apabila tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka peledakan jumlah penduduk akan terjadi, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai masalah sosial.

*Kecenderungan wanita di Wakatobi untuk melakukan perkawinan pada usia muda tergolong kecil. Hal ini baik, mengingat semakin tua usia seseorang kedewasaan dan kematangan dalam bertindak semakin tinggi*

Salah satu faktor penentu fertilitas yaitu persentase perempuan pernah kawin yang berusia 10 tahun keatas menurut usia kawin pertama. Semakin muda usia kawin pertama, maka peluang wanita tersebut untuk melahirkan anak dengan jumlah yang banyak semakin tinggi. Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang

**Tabel 1.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016**

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun	
	2016	2017
10-16	12.63	11.11
17-18	25.62	22.44
19-20	26.36	24.12
21 +	35.39	42.33

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2016

Perlindungan Anak Usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia Pernikahan Pertama bagi seorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, persentase wanita di Kabupaten Wakatobi berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 11,11 persen angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 12,63 persen. Dapat dilihat juga bahwa pada kelompok umur 17-18 tahun, juga mengalami penurunan persentase, yang semula 25,62 persen pada tahun 2016 menjadi 22,44 persen pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 19-20 tahun yang semula 26,36 persen menjadi 24,12. Penambahan persentase hanya terjadi pada wanita usia lebih dari 21 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecenderungan wanita di Wakatobi untuk melakukan perkawinan pada usia muda tergolong kecil. Hal ini baik, mengingat semakin tua usia seseorang kedewasaan dan kematangan dalam bertindak semakin tinggi.

### **Keluarga Berencana**

Usaha pemerintah untuk menekan angka kelahiran adalah dengan menggalakkan terus gerakan KB (Keluarga Berencana). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Untuk itu, salah satu indikator dalam melihat keberhasilan program keluarga berencana adalah dengan semakin meningkatnya akseptor aktif (pengguna alat/cara KB). Indikator ini dimaksudkan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Dan sasaran utama dari program ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS), terutama diarahkan kepada kaum wanita usia 15-49 tahun dan berstatus kawin.

Dari 17.446 Pasangan Usia Subur (PUS) yang tercatat di BKKBN, terdapat 9.793 PUS yang tercatat aktif ber-KB pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017, dengan jumlah PUS yang sama, namun jumlah PUS yang KB aktif sebanyak 14.364 PUS. Hal ini menunjukkan bahwa program KB di Kabupaten Wakatobi pada tahun

2017 baik. Sisanya terdapat 7.653 PUS yang tidak ber-KB pada tahun 2016 dan sebanyak 3.083 PUS pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak pasangan yang telah ikut serta menjadi peserta KB aktif dibandingkan peserta yang tidak ikut ber-KB.

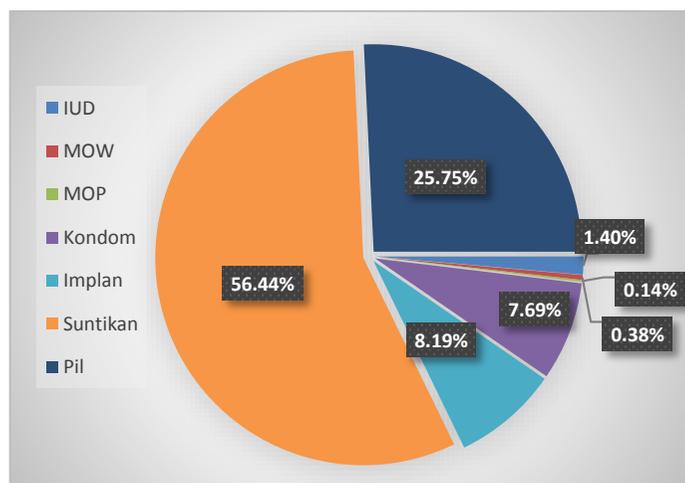
**Tabel 2.1 Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kesertaan Ber-KB tahun 2017**

Status Kesertaan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	
	2016	2017
PUS KB Aktif	9 793	14 364
PUS Tidak Ber-KB	7 653	3 082
<b>Jumlah PUS</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446</b>

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2017

Banyaknya peserta yang ber-KB menjadi tolak ukur keberhasilan BKKBN dalam mempromosikan produk KB. Walaupun sudah menunjukkan pola perkembangan yang cukup pesat, namun jika target BKKBN semua PUS ber-KB maka masih terdapat PR besar yang harus dihadapi BKKBN.

**Persentase PUS Peserta KB Menurut Jenis Kontrasepsi Tahun 2018**



Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2018

Ada berbagai macam alat KB yang dikenal di Indonesia. Diantaranya yaitu IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil KB. Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa hampir setengah pasangan PUS yang menggunakan alat kontrasepsi KB memilih KB suntikan. Selain suntikan KB, alat kontrasepsi yang juga populer dikalangan pasangan yaitu pil. Tercatat 56,44 persen PUS yang ber-KB memilih suntik sebagai alat kontrasepsi. Selanjutnya, 25,75 persen PUS yang ber-KB memilih pil KB sebagai alat kontrasepsi yang digunakan.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# **BAB 2**

# **KESEHATAN DAN GIZI**

<https://waktubikangas.go.id>

Pemerintah berupaya untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, obat yang terjangkau bagi masyarakat, fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas/pustu, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa, penyediaan fasilitas air bersih serta pembangunan sanitasi, penambahan dan peningkatan kualitas petugas, dan juga pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

*Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan*

Keadaan kesehatan penduduk dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Apabila tingkat kesehatan baik maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga baik, demikian juga sebaliknya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

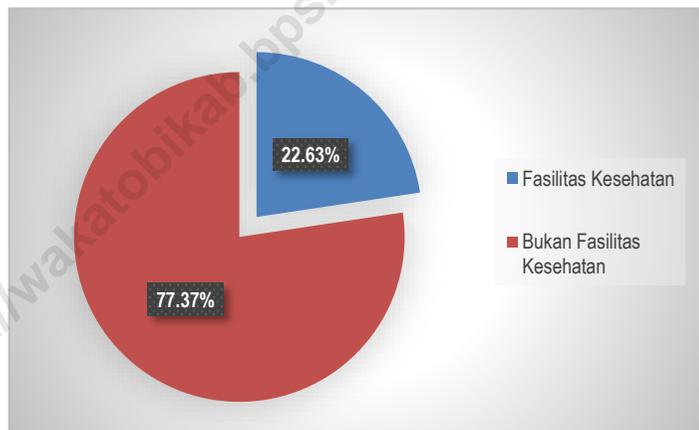
### **Penolong Kelahiran**

Cara menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Penolong kesehatan yang

*Cara menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Penolong kesehatan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi Standar kesehatan.*

ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi Standar kesehatan. Karena, ketika melahirkan wanita berada pada posisi antara hidup dan mati. Oleh karenanya, ketika saat melahirkan merupakan saat-saat yang rawan sehingga membutuhkan peralatan medis dan tenaga medis yang memadai. Semakin lengkap alat medis dan tenaga medis yang tersedia di tempat melahirkan maka semakin besar peluang untuk ibu dan anak lahir selamat.

**Gambar 2.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan, 2017**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut tempat melahirkan anak lahir hidup terakhir di Wakatobi terbanyak bertempat di rumah. Sebesar 77,37 persen perempuan memilih untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Sedangkan, sisanya 22,63 persen perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya fasilitas kesehatan ketika melahirkan masih kurang.

## Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita

Seorang ibu hamil harus berjuang menjaga asupan nutrisinya agar pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan janinnya optimal. Idealnya, berat badan bayi saat dilahirkan adalah tidak kurang dari 2500 gram, dan panjang badan bayi tidak kurang dari 48 cm. Inilah alasan mengapa setiap bayi yang baru saja lahir akan diukur berat dan panjang tubuhnya, dan dipantau terus menerus terutama di periode emas pertumbuhannya, yaitu 0 sampai 2 tahun.

Dalam kurun waktu 2 tahun ini, orang tua harus berupaya keras agar bayinya tidak memiliki panjang tinggi badan atau panjang badan yang *stunting* (pendek). Yang kita khawatirkan adalah di dalam kandungan ada gangguan pertumbuhan, sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif (intelegensia).

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada balita sangat dianjurkan, karena ASI mengandung zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi serta mengandung zat penolak/pencegah penyakit. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah memprogramkan pemberian ASI bagi bayi minimal 4 bulan pertama. Karena pemberian ASI empat bulan pertama diharapkan memberikan daya tahan bayi terhadap berbagai penyakit dan membantu kecerdasan bayi. Kandungan ASI lebih lengkap dibanding makanan tambahan lainnya. Secara psikologis pemberian ASI juga dapat meningkatkan kasih sayang serta "kedekatan" antara ibu dan anak.

Ada berbagai hal yang membuat seorang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Diantaranya yaitu ASI tidak keluar, anak tidak mau minum ASI, dll. Dari seluruh anak usia kurang dari dua tahun, terhadap 86,96 persen anak yang pernah diberi ASI. Sedangkan sisanya 9,74 persen tidak pernah diberi ASI. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk memberikan ASI anaknya cukup baik.

Diketahui pula bahwa 90,26 persen anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun yang ada di Kabupaten Wakatobi pernah diberi ASI dan sebanyak 83,61 persen anak perempuan yang berusia kurang dari 2 tahun pernah diberi ASI.

**Tabel 2.1 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 tahun yang pernah diberi ASI dan yang masih Diberi ASI menurut Jenis Kelamin, 2017**

Jenis Kelamin	Persentase
<b>Laki-Laki</b>	90,26
<b>Perempuan</b>	83,61
<b>Jumlah</b>	<b>86,96</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa lamanya pemberian ASI menurut jenis kelamin yaitu anak laki-laki rata-rata hingga usia 10 hingga 11 bulan.

**Table 2.2 Rata-rata Lama Pemberian ASI Anak Berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang pernah diberi ASI menurut Karakteristik tahun 2017**

Jenis Kelamin	Rata-Rata lama Pemberian ASI (Bulan)
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-Laki	10,91
Perempuan	10,64
<b>Pendidikan Tertinggi KRT</b>	
Tidak pernah Sekolah/ Tidak tamat SD	9,95
SD dan Sederajat	9,80
SMP dan Sederajat	8,60
SMA ke atas	13,25

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2016

Anak perempuan rata-rata hingga usia 10 hingga sebelas bulan. Namun, jika dilihat dari angkanya anak laki-laki memiliki kecenderungan lebih lama di beri ASI dibanding anak Perempuan. Selain itu, dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendidikan KRT maka semakin tinggi rata-rata lama pemberian ASI.

### **Status Kesehatan**

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventif. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, disisi lain pemenuhan kebutuhan semakin lama semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan.

**Tabel 2.3 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin, 2017**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Persentase</b>
<b>Laki-laki</b>	8,47
<b>Perempuan</b>	10,50
<b>Jumlah</b>	9,53

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Angka kesakitan/persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan secara total pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,53 persen. Terdiri dari 8,47 persen laki-laki dan 10,50 persen perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2017 tidak begitu banyak. Namun, meskipun tidak banyak, hal ini perlu diperhatikan mengingat setiap penduduk berhak untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Pada tahun 2017 juga diketahui bahwa persentase penduduk berjenis kelamin perempuan yang mengalami

keluhan kesehatan lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung tangguh dan lebih sehat dibandingkan perempuan.

**Tabel 2.4 Rata-rata Lama Sakit (Hari) Penduduk yang mengalami Kesakitan tahun 2017**

Jenis Kelamin	Rata-rata Lama Sakit (Hari)
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-laki	8,91
Perempuan	9,35
<b>Total</b>	<b>9,16</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Wakatobi yang menderita kesakitan secara total yaitu selama 9 hingga 10 hari. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan sakit lebih lama dibanding laki-laki. Rata-rata perempuan sakit selama 9 hingga 10 hari, sedangkan laki-laki selama 8 hingga 9 hari.

### **Sarana Kesehatan**

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit biasanya berada di ibukota kabupaten/kota, sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari

kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua Puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

**Tabel 2.5 Rata-rata Penduduk Per Fasilitas Kesehatan dan Rata-Rata Penduduk per Tenaga Kesehatan tahun 2016-2017**

Indikator	2016	2017
<b>Rata-Rata Penduduk Per Fasilitas Kesehatan</b>		
Rumah Sakit	95 209	95 386
Puskesmas	4 760	4 769
Posyandu	738	696
Klinik/Balai Kesehatan dan Polindes	7 323	8 671
<b>Rata-rata Penduduk per Tenaga Kesehatan</b>		
Dokter	6 347	5 611
Perawat	890	891
Bidan	1 670	1 673
Farmasi	7 934	7 948

Sumber : Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2018

Beban tanggungan tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu peningkatan jumlah tenaga kesehatan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan terjadi penurunan kuantitas tenaga kesehatan. Semakin besarnya beban tanggungan kesehatan maka kemampuan untuk memberikan pelayanan prima akan semakin menurun. Selain tenaga kesehatan, semakin besar rata-rata penduduk per fasilitas kesehatan maka kesempatan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan menjadi menurun.

**Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Pernah Dirawat Inap Selama Setahun Terakhir dan Rata-Rata Rawat Inap menurut Jenis Kelamin tahun 2017**

Jenis Kelamin	Pernah dirawat Inap Selama Setahun Terakhir	Rata-rata Rawat Inap
Laki-laki	2.21	5.84
Perempuan	1.34	3.71
<b>Total</b>	<b>1.76</b>	<b>4.99</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Besarnya persentase penduduk yang pernah dirawat inap selama setahun terakhir pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,76 persen, untuk jenis kelamin laki-laki besar persentasenya yaitu sebesar 2,21 dan untuk jenis kelamin perempuan besar persentasenya yaitu sebesar 1,34. Sedangkan untuk rata-rata rawat inap, secara total yaitu selama 4 hingga 5 hari dan jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, untuk jenis kelamin laki-laki rata-rata rawat inap yaitu selama 5 hingga 6 hari, untuk jenis kelamin perempuan rata-rata rawat inap selama 3 hingga 4 hari.

# **BAB 4**

# **PENDIDIKAN**

<https://widyaiswara.widyaiswara.go.id>

Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan dalam arti semakin tinggi jenjang pendidikan yang berhasil dilalui, semakin baik kualitas sumber daya manusia-nya. Apabila program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ingin mencapai hasil maka jelas, maka aspek pendidikan merupakan suatu bagian yang sangat penting. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa.

Kualitas SDM tidak dapat terlepas dari faktor pendidikan, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai harus terus diusahakan. Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, antara lain melalui program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun yang dianggap sukses kemudian ditingkatkan lagi menjadi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Terakhir amanat konstitusi mewajibkan sektor pendidikan harus diberi alokasi 20 persen dari APBN. Semua ini tidak lain bertujuan supaya pendidikan di tanah air menjadi berkualitas sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi saat ini.

Keberhasilan dalam program pendidikan merupakan tujuan yang penting dari pembangunan. Sejauh mana tingkat keberhasilan tercermin dalam profil pendidikan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program pendidikan. Sehingga dipandang perlu untuk menampilkan indikator-indikator keberhasilan pembangunan pendidikan.

## Kemampuan Membaca-Menulis

Membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, dibutuhkan alat ukur yang dapat mengukur sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka Melek Huruf (AHM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian tersebut. Angka Melek Huruf (AHM) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan.

*AHM melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.*

**Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Keatas menurut Kemampuan Membaca-Menulis dan Jenis Kelamin tahun 2017**

Kemampuan Membaca-Menulis	Laki-Laki	Perempuan	Total
Mampu baca tulis huruf latin	95.7	91.93	93.69
Mampu baca tulis huruf arab	44.24	48.64	46.58
Mampu baca tulis huruf lainnya	2.07	NA	1.47
Buta huruf	3.94	6.48	5.29

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Lebih dari 90 persen atau lebih tepatnya 93,69 persen penduduk usia 15 tahun keatas mampu membaca menulis huruf latin dan huruf lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan

dasar cukup efektif untuk memberantas buta huruf yang ada di masyarakat.

### Angka Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari masing-masing penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan tingkat ketersediaan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah di sini dinyatakan sebagai rasio penduduk yang masih sekolah terhadap penduduk usia sekolah, seperti usia 7-12 (SD/MI), usia 13-15 (SMP/MTs), usia 16-18 (SMU/SMK/MA), usia 19-24 (D1/D2/Akademi/D3/D4/Perguruan Tinggi). Semakin besar Angka Partisipasi Sekolah berarti menunjukkan gejala yang semakin baik.

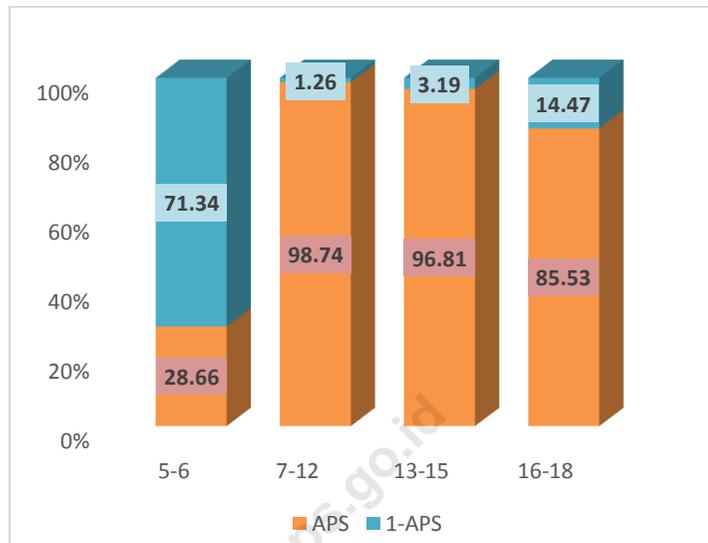
**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2016**

Kelompok Umur dan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	AP
APS : 5-6	20.24	37.73	28.66
7-12	100.00	97.46	98.74
13-15	97.89	95.46	96.81
16-18	76.64	93.06	85.53
APM: SD	98.21	95.54	96.88
SMP	84.64	73.77	79.82
SMA	61.04	63.43	63.82

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

**Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2017**

*APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.*

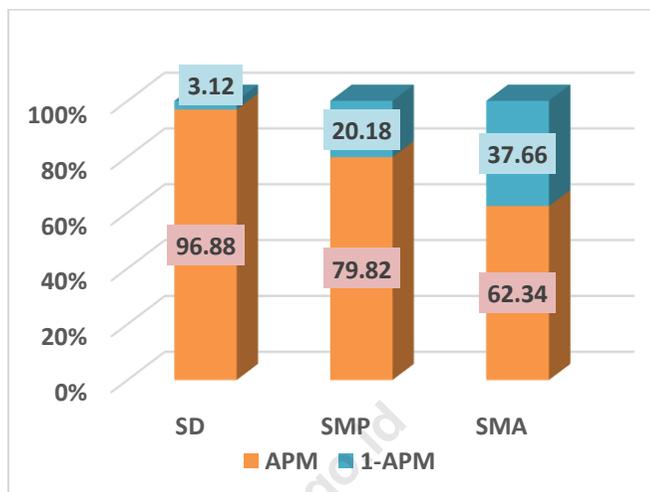


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

APS penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 memiliki pola semakin rendah pada usia yang semakin tua. Pada kelompok usia 5-6 tahun APS sebesar 28,66 persen, yang artinya 28,66 persen penduduk usia 5-6 tahun masih bersekolah dan sisanya sebesar 71,34 persen penduduk tidak bersekolah. Pada kelompok usia 7-12 tahun 98,74 persen penduduk sedang bersekolah. APS pada kelompok usia 13-15 tahun yaitu sebesar 96,81 persen yang artinya sebesar 96,81 persen penduduk yang berusia 13-15 tahun sedang bersekolah dan sisanya 3,19 persen tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi. APS pada kelompok usia 16-18 yaitu sebesar 85,53 persen dan sisanya sebesar 14,47 persen penduduk tidak bersekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

**Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2017**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

APM pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 96,88 persen yang artinya terdapat 96,88 persen anak berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah sedang mengemban pendidikan pada jenjang SD. APM pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 62,34 persen yang artinya terdapat 62,34 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah sedang mengemban pendidikan pada jenjang SMA. APM Kabupaten Wakatobi menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan.

### **Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas**

Rasio Murid terhadap guru (murid-guru) dan murid terhadap sekolah (murid-sekolah) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pendidikan. Semakin kecil rasionya, berarti semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Rasio murid terhadap guru menggambarkan beban tugas yang

dijalankan oleh seorang guru sedangkan rasio kelas terhadap murid (murid-kelas) menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar. Namun karena keterbatasan data, maka jumlah ruang kelas diganti dengan jumlah sekolah.

*Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.*

**Tabel 3.3 Rasio Guru per Murid, Murid per Sekolah, Murid per Guru, Tahun 2017**

Kelompok Umur	Guru per Sekolah	Murid per Sekolah	Murid per Guru
TK-Sederajat	4	31	9
SD-Sederajat	9	110	12
SLTP-Sederajat	12	123	10
SLTA-Sederajat	20	237	12
<b>Wakatobi</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>11</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2017

Rasio murid per guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung menurun. Di Kabupaten Wakatobi rasio murid per guru sebesar 11 yang artinya seorang guru rata-rata memiliki beban mengawas dan memperhatikan 11 murid.

### **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat memberi gambaran bagaimana potensi dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dari seberapa tingginya jenjang pendidikan yang berhasil dilalui. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Wakatobi cenderung masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan lebih

dari 50 persen penduduk berusia lebih dari 15 tahun tidak memiliki ijazah dan memiliki ijazah SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun pemerintah belum begitu terlihat hasilnya.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# **BAB 4**

# **KETENAGAKERJAAN**

<https://www.tobinbps.go.id>

*Tenaga kerja dalam pembangunan perekonomian mempunyai dua sisi yang penting yaitu sebagai faktor produksi dan konsumen. Tenaga kerja sebagai faktor produksi jelas sangat penting sebagai penggerak perekonomian karena proses produksi tidak bisa berfungsi tanpa tenaga kerja*

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.

Tenaga kerja dalam pembangunan perekonomian mempunyai dua sisi yang penting yaitu sebagai faktor produksi dan konsumen. Tenaga kerja sebagai faktor produksi jelas sangat penting sebagai penggerak perekonomian karena proses produksi tidak bisa berfungsi tanpa tenaga kerja. Sebagai konsumen tenaga kerja juga sangat penting peranannya, dimana merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

### **Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja**

Dalam konsep BPS, penduduk yang masuk dalam usia kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja

dibagi lagi menjadi penduduk yang masuk angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) adalah mereka yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja baik yang bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terkait dalam lapangan kerja, misalnya sekolah dan mengurus rumah tangga.

**Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Ketenagakerjaan tahun 2015 dan 2017**

Indikator	2015	2017
<b>Angkatan Kerja</b>	43 256	41 974
1. Bekerja	41 421	40 954
2. Pengangguran	1 835	1 020
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	20 607	22 721
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	63 863	64 695

Sumber : Sakernas diolah 2015 dan 2017

Indonesia membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja adalah setiap penduduk yang dianggap mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, atau umumnya penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu pada kelompok umur 15 tahun keatas.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 sebanyak 41.974 jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, yang memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 43.256 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu dapat dipandang sebagai hal positif. Hal ini terjadi jika peningkatan jumlah angkatan kerja tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja akan mengakibatkan tidak tertampungnya

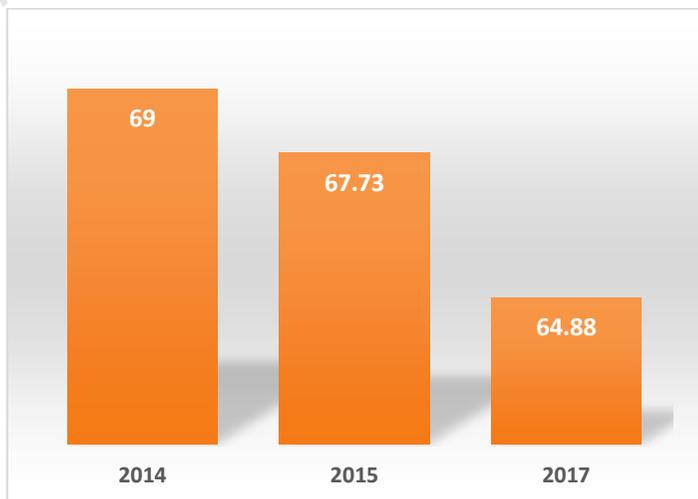
angkatan kerja di pasar tenaga kerja yang akan berakibat pada meningkatnya angka pengangguran.

### Indikator Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

**Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014, 2015 dan 2017**



Sumber : Sakernas diolah 2014, 2015, 2017

Tiga tahun yaitu 2014, 2015 dan 2017, TPAK memiliki pola menurun. Pada tahun 2015, TPAK menurun menjadi 67,73 persen

yang sebelumnya 69,00 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2017, TPAK sebesar 64,88 pesen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017.

**Gambar 4.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2014, 2015 dan 2017**

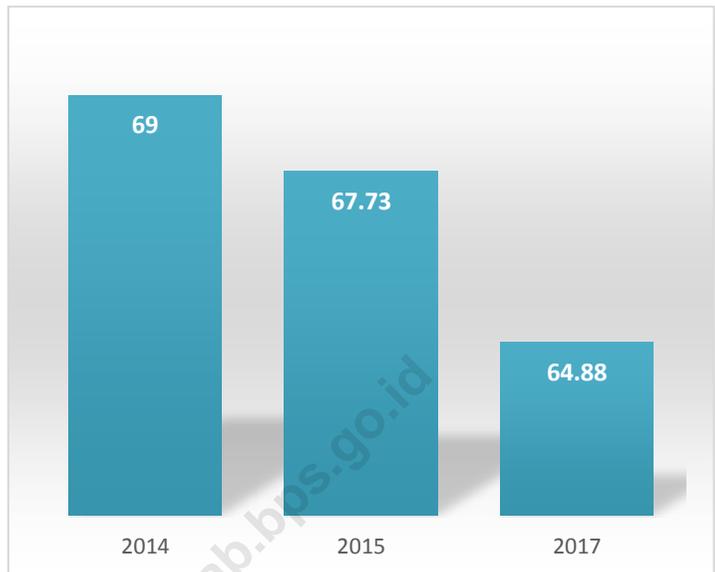


Sumber : Sakernas diolah 2014, 2015, 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Tiga tahun yaitu 2014, 2015 dan 2017, TPAK memiliki pola menurun. Pada tahun 2015, TPAK menurun menjadi 67,73 persen yang sebelumnya 69,00 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2017, TPAK sebesar 64,88 pesen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017.

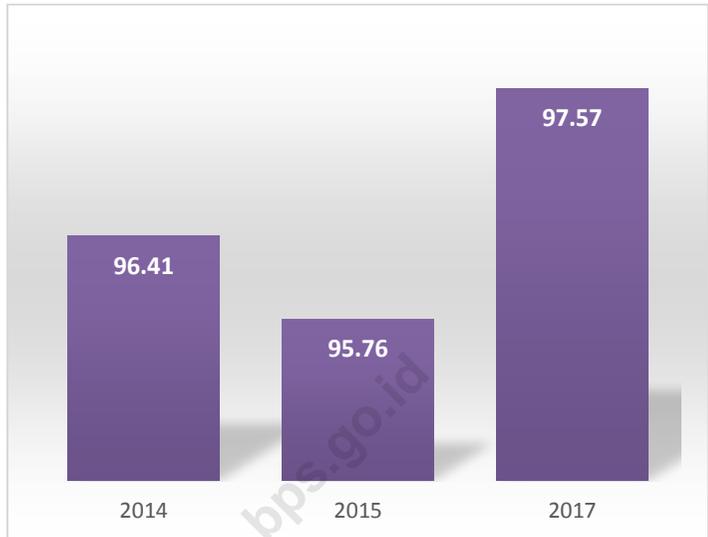
**Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
tahun 2014, 2015 dan 2017**



Sumber : Sakernas diolah 2014, 2015, 2017

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar peluang seseorang yang termasuk angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar tenaga kerja dalam suatu wilayah. Selama tahun 2013 hingga tahun 2015 TKK Kabupaten Wakatobi berfluktuatif. Pada tahun 2013, TKK sebesar 92,93 persen yang artinya peluang tenaga kerja untuk terserap pada pasar tenaga kerja pada tahun 2013 sebesar 92,93 persen. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 96,41 persen. Hal ini baik mengingat pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja Kabupaten Wakatobi juga mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015

**Gambar 4.4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)  
tahun 2014, 2015 dan 2017**



Sumber : Sakernas diolah 2014, 2015, 2017

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar peluang seseorang yang termasuk angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar tenaga kerja dalam suatu wilayah. Selama tahun 2013 hingga tahun 2015 TKK Kabupaten Wakatobi berfluktuatif. Pada tahun 2013, TKK sebesar 92,93 persen yang artinya peluang enaga kerja untuk terserap pada pasar tenaga kerja pada tahun 2013 sebesar 92,93 persen. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 96,41 persen. Hal ini baik mengingat pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja Kabupaten Wakatobi juga mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015, TKK mengalami penurunan menjadi 95,76 persen.

**Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
tahun 2014, 2015 dan 2017**



Sumber : Sakernas diolah 2014, 2015, 2017

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Sehingga, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 TPT sebesar 3,59 persen meningkat menjadi 4,24 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi 2,43 persen pada tahun 2017.

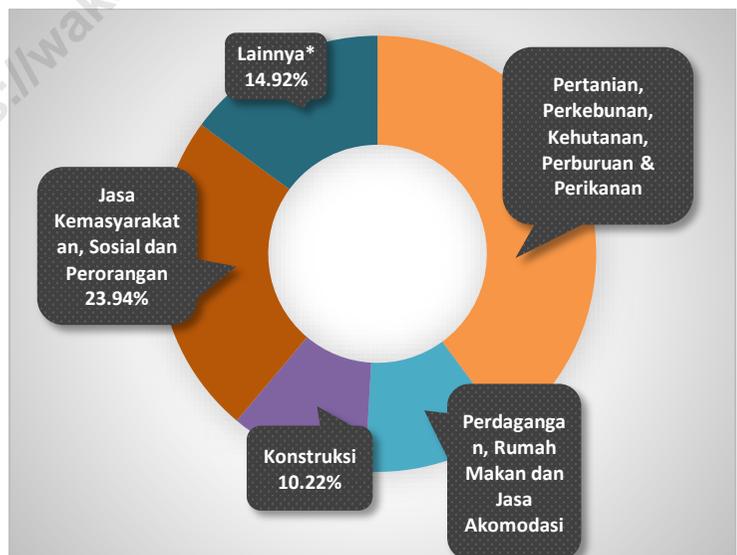
### **Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan**

Kualitas penduduk khususnya angkatan kerja akan mempengaruhi tipe pekerjaan yang ada dalam pasar kerja. Sedangkan perkembangan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau perubahan struktur dari pertanian menjadi industri dan jasa-jasa

terutama akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar kerja (Tjiptoherijanto. 2000) Di lain pihak penciptaan kesempatan kerja merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peluang pembangunan manusia (UNDP. 1996:87 dalam BPS. 1997).

Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan jenis lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, pemburuan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, dan usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa masyarakat).

**Gambar 4.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama tahun 2017**



Sumber : Sakernas Agustus 2017 (diolah)

Berdasarkan Sakernas 2017, di Kabupaten Wakatobi secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian

memiliki posisi terbanyak yaitu sebesar 39,92 persen. Artinya, sebesar 39,92 persen penduduk bekerja di Kabupaten Wakatobi bekerja di sektor pertanian. Disusul dengan penduduk yang bekerja di sektor jasa sebesar 23,94 persen. Sektor perdagangan sebanyak 11 persen, sektor konstruksi sebanyak 10,22 persen dan lainnya sebanyak 14,92 persen.

**Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan tahun 2015 dan 2017**

Status Pekerjaan	2015	2017
Berusaha Sendiri	27.16	29.26
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	18.58	20.23
berusaha dibantu buruh tetap	5.61	2.46
karyawan	21.72	28.84
pekerja bebas pertanian	6.37	5.25
Pekerja Keluarga	20.57	13.84
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan 2017

Jika dilihat dari komposisi penduduk bekerja menurut status pekerjaan, penduduk bekerja yang berusaha sendiri memiliki persentase komposisi tertinggi yaitu sebesar 27,16 persen pada tahun 2015 dan 29,26 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil yang tidak membutuhkan tenaga kerja merupakan pekerjaan andalan di Kabupaten Wakatobi.

Pada tahun 2017 komposisi penduduk yang bekerja, dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu sebesar 20,23 persen kecil jika dibandingkan jumlah karyawan yaitu sebesar 28,84 persen. Diketahui terjadi pergeseran pola status pekerjaan tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 susunan jenis pekerjaan terbanyak yaitu berusaha sendiri, karyawan, pekerja keluarga, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, dan berusaha dibantu buruh tetap. Sedangkan, pada tahun 2017, susunannya yaitu berusaha sendiri, karyawan, berusaha

dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, pekerja bebas di pertanian, dan berusaha dibantu buruh tetap.

### Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh dibawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan dibawah kemampuan sebenarnya. Selain itu, seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sementara tidak bekerja	474	610	1084
1-14	956	1378	2334
15-24	2023	4360	6383
25-34	3884	3654	7538
35-40	4748	3280	8028
41+	10734	4853	15587
<b>Jumlah</b>	<b>22819</b>	<b>18135</b>	<b>40954</b>

Sumber : Sakernas 2017 (Diolah)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang positif antara lama jam kerja dengan jumlah orang yang bekerja. Artinya, kecendrungan penduduk Kabupaten Wakatobi memiliki pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk yang bekerja lebih dari 41 jam.

**BAB 5**  
**TARAF DAN POLA**  
**KONSUMSI**

*Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan.*

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### **Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Kedadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Gambar 5.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, Kabupaten Wakatobi, 2016**



Sumber : Susenas, 2017 (Diolah)

Pada tahun 2017, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan pada kelompok makanan terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, yaitu Rp 85.831,00 atau sebesar 22,09 persen dari total seluruh pengeluaran kelompok makanan. Kemudian, pengeluaran untuk ikan menempati peringkat kedua (Rp 67.692,00) serta pengeluaran untuk padi-padian menempati peringkat ketiga (Rp 60.519,00). Namun, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan pada kelompok makanan terendah berada pada pengeluaran untuk kacang-kacangan (Rp 1.849,00). Bila dibandingkan dengan tahun 2016, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan pada kelompok makanan terbesar berada pada pengeluaran untuk padi-padian (Rp 71.744,00), kemudian pengeluaran untuk ikan (Rp 61.841,00), dan pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi (Rp 47.433,00); sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita terendah berada pada pengeluaran

untuk kacang-kacangan. Rincian pengeluaran kelompok makanan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel

**Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran perKapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan, Kabupaten Wakatobi tahun 2017**

<b>Kelompok</b>	<b>Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (Rp)</b>
<b>Makanan</b>	<b>2017</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Padi-padian</b>	60519
<b>Umbi-Umbian</b>	9820
<b>Ikan</b>	67692
<b>Daging</b>	3527
<b>Telur dan Susu</b>	20973
<b>Sayur-sayuran</b>	24432
<b>Kacang-kacangan</b>	1849
<b>Buah-buahan</b>	12521
<b>Minyak dan Lemak</b>	9849
<b>Bahan minuman</b>	14323
<b>Bumbu-bumbuan</b>	10706
<b>Konsumsi Lainnya</b>	12019
<b>Makanan dan Minuman Jadi</b>	85831
<b>Tembakau dan Sirih</b>	54526
<b>Jumlah</b>	<b>388587</b>

Sumber : Susenas, 2017 (Diolah)

Baik pada tahun 2017, kelompok pengeluaran perumahan, aneka barang dan jasa, serta barang tahan lama menempati tiga besar pada pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Pada tahun 2017, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan pada kelompok bukan makanan terbesar, yaitu pada pengeluaran untuk perumahan, yaitu Rp 180.033,00. Kemudian pengeluaran untuk barang dan jasa (Rp

74.424,00) menempati peringkat kedua dan pengeluaran untuk barang tahan lama (Rp 31.696,00) menempati peringkat ketiga, sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan terendah berada pada pengeluaran untuk pakaian (Tabel 5.2).

**Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, Kabupaten Wakatobi, 2017**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
	2017	
<b>Makanan</b>	<b>388586</b>	<b>53.41</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>339016</b>	<b>46.59</b>
Perumahan	180033	24.74
Barang dan Jasa	74424	10.23
Pakaian	18256	2.51
Barang Tahan Lama	31696	4.36
Lainnya	34608	4.76
<b>Jumlah</b>	<b>727602</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas, 2016 (Diolah)

**BAB 6**  
**PERUMAHAN DAN**  
**LINGKUNGAN**

*Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.*

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia selain pakaian dan makanan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Keadaan perumahan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi rumah sering dikaitkan dengan keadaan fasilitas dan lingkungan karena fasilitas rumah dan lingkungan yang tidak sehat akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Fasilitas rumah di sini tidak sepenuhnya diartikan dengan kelengkapan atau kemewahan perabot rumah tangga, tetapi lebih dititikberatkan pada standar kualitasnya misalnya keadaan luas lantai, jenis dinding atap, dan penerangan. Sementara itu, dari sisi kesehatan lingkungan dapat dilihat dari fasilitas sumber air minum dan tempat buang air besar.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status

sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Kondisi rumah tinggal penduduk dengan kualitas yang baik merupakan suatu hal yang diharapkan oleh semua pihak. Kenyamanan rumah tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Kesejahteraan disini berarti paling tidak memenuhi syarat kesehatan dan layak walaupun tentunya keadaan ini akan sangat relatif.

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah. Namun pada bab ini hanya dibatasi dengan pendekatan luas lantai, jenis lantai terluas dan dinding. Dengan asumsi semakin lebar luas lantai, semakin baik kualitas lantai, serta semakin baik jenis dinding, kualitas rumah semakin baik.

Berdasarkan data Susenas 2016, lebih dari 99 persen atau hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Wakatobi bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Pada tahun 2016, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,80 persen atau

*Kondisi rumah tinggal penduduk dengan kualitas yang baik merupakan suatu hal yang diharapkan oleh semua pihak. Kenyamanan rumah tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya.*

*Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumahtinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah.*

mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 98,44 persen. Meskipun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantaikan bukan tanah, namun masih terdapat rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantaikan tanah yaitu sebesar 15,27 di tahun 2015 dan mengalami peningkatan menjadi 17,70 persen di tahun 2016.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2016 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 96.98 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 99.68 persen. Selain itu, pada tahun 2016 dan 2017 mayoritas rumah tangga tinggal di rumah yang dinding terluasnya tembok dan kayu, dengan persentase sebesar 92,00 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 94,46 persen pada tahun 2017.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumahtinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruangan per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup>.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan tahun 2016 – 2017**

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah.

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2016	2017
Lantai bukan tanah (%)	99.80	99,55
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	96.98	99,68
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	92.00	94,46
Luas lantai tempat tinggal 50-99 m <sup>2</sup> (%)	58.75	43,59

Sumber Susenas 2015 dan 2016 (Diolah)

Pada tahun 2017, sebagian besar rumah tangga bertempat tinggal dengan luas lantai sekitar 50-99 m<sup>2</sup>, yaitu dengan persentase sebesar 43,59 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, persentase tersebut mengalami penurunan yang semula 58,75 persen pada tahun 2016.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas lantai Rumah Tempat Tinggal, Kabupaten Wakatobi, 2016 – 2017**

Luas Lantai Rumah Tempat Tinggal	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2016	2017
≤ 19 m <sup>2</sup>	2.66	4.07
20-49 m <sup>2</sup>	19.14	27.69
50-99 m <sup>2</sup>	58.75	43.59
100-149 m <sup>2</sup>	15.12	15.52
≥ 150 m <sup>2</sup>	4.33	9.13

Sumber Susenas 2015 dan 2016 (Diolah)

Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih dari 150 m<sup>2</sup> juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, sebanyak 4,33 persen rumah tangga

memiliki luas lantai lebih dari 150 m<sup>2</sup>, kemudian meningkat menjadi 9,13 persen pada tahun 2017; sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki luas lantai 100-149 m<sup>2</sup> juga mengalami peningkatan yang semula 15,12 persen pada tahun 2016 menjadi 15,52 persen pada tahun 2017.

### **Fasilitas Perumahan**

Kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat lewat program listrik, air ledeng masuk desa menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Keberhasilan ini paling tidak digambarkan dari jumlah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai sumber penerangan dan air ledeng sebagai sumber air minum. Fasilitas pokok yang terpenting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih, serta jamban yang memadai.

Fasilitas rumah tangga tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari rumah tangga itu sendiri dan dari luar rumah tangga. Misalnya untuk listrik dan air ledeng maka rumah tangga akan memperoleh dari luar rumah tangga (pemerintah) dengan membayar balas jasa, tetapi untuk fasilitas tempat buang air besar, cukup dari rumah tangga itu sendiri asal mempunyai kemampuan ekonomi dan kemauan. Artinya bisa jadi suatu rumah tangga memiliki kemampuan ekonomi untuk memiliki air ledeng, tetapi karena di sekitar lokasi rumah tangga tersebut belum ada fasilitas air ledeng yang terpasang, maka rumah tangga tersebut tidak dapat menggunakan air ledeng.

Pada tahun 2016, rumah tangga di Kabupaten Wakatobi yang telah mengakses air bersih, yaitu air yang bersumber dari ledeng, air kemasan bermerk, air isi ulang, pompa/sumur bor, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik)  $\geq 10$  m, mencapai 79.28 persen. Dari persentase tersebut, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumur

terlindung dengan persentase sebesar 25,33 persen disusul dengan air isi ulang sebesar 24,93 persen, leding/pipa meteran dan eceran sebesar 12,08 persen, dan air kemasan bermerk sebesar 1,14 persen.

**Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Kabupaten Wakatobi, 2016 – 2017**

Fasilitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga	
	2016	2017
Air minum bersih <sup>1)</sup>	79.28	73,21
Jamban sendiri	81.32	84.94
Jamban dengan tangki septik, SPAL	42,56	88.74

Catatan : <sup>1)</sup> Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik)  $\geq 10$  m

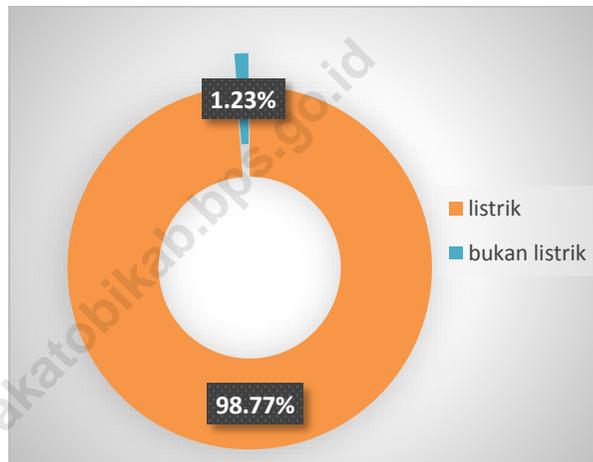
Sumber : Susenas 2016 dan 2017 (Diolah)

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Di kabupaten Wakatobi, rumah tangga yang telah memiliki jamban sendiri meningkat dalam dua tahun terakhir yaitu dari 81,32 persen di tahun 2016 menjadi 84,94 persen di tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 3,72 persen. Selain itu, rumah

tangga yang memiliki jamban dengan tengki septik di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang memiliki jamban dengan tangka septik mencapai 88,74 persen atau mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang diketahui sebesar 42,56 persen.

**Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Wakatobi tahun 2017**



Sumber : Susenas 2017 (Diolah)

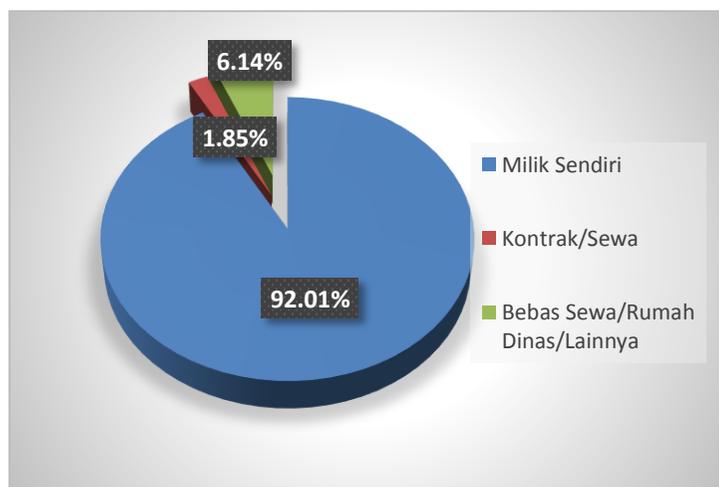
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik sebesar 98,77 persen yang terbagi menjadi 88,97 persen dari listrik PLN dan 9,80 persen dari listrik non PLN. Meskipun demikian, masih terdapat 1,23 persen rumah tangga di Kabupaten Wakatobi yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik.

## Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah sangat berpengaruh pada perilaku dan psikologi penghuninya. Rumahtangga yang tinggal di rumah sendiri akan merasa lebih tenang dibanding dengan rumah bukan miliknya. Oleh karena itu rumah tangga yang tinggal di rumah bukan miliki sendiri, dapat dijadikan indikator sebagai jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal tahun 2017**



Sumber : Susenas 2017 (Diolah)

Berdasarkan hasil Susenas 2017, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 92,01 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 1,85 persen. Sedangkan untuk kontrak/sewa, dan bebas sewa/rumah dinas/lainnya sebanyak 6,14 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Wakatobi telah memiliki rumah sendiri, dan hanya kurang dari 10 persen saja yang tidak tinggal di rumah milik sendiri.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

# **BAB 7**

# **KEMISKINAN**

<https://waka.kab.go.id>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

### **Perkembangan Penduduk Miskin**

Penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi menunjukkan tren yang cenderung menurun dan berfluktuatif selama periode 2012 – 2017. Tahun 2012, jumlah penduduk miskin sebesar 15,1 ribu jiwa

atau 15,99 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan. Mengalami peningkatan pada tahun 2013, menjadi 16,5 ribu jiwa atau 17,40. Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk miskin menurun menjadi 15,4 ribu jiwa atau 16,27 persen dari jumlah penduduk. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan dengan jumlah 15,73 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 16,46 persen di tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang semula 16,88 persen. Pada tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan yang sebelumnya persentase penduduk miskin sebesar 16,46, pada tahun 2017 menjadi 16,19 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi untuk seterusnya bisa ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin,  
Kabupaten Wakatobi, 2012 – 2017**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah(ribu orang)	Persentase
2012	198 229	15.1	15.99
2013	202 103	16.5	17.4
2014	206 570	15.4	16.27
2015	207 228	16.1	16.88
2016	234 351	15.73	16.46
2017	239 819	15.49	16.19

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi

**Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>),  
Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)**

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Wakatobi menunjukkan peningkatan setiap tahun selama periode 2012 – 2017. Pada tahun 2012, garis kemiskinan di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 198.229,- dan meningkat terus hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 239.819,-.

Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2012 – 2017, nilai  $P_1$  cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai  $P_1$  yang semula 1,68 pada tahun 2012 menjadi 2,11 dan menurun kembali di tahun 2014 menjadi 1,42, selanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan nilai masing-masing 3,69 di tahun 2015 dan 15,73 di tahun 2016. Pada tahun 2017, nilai  $P_1$  mengalami penurunan menjadi 2,85. Nilai  $P_1$  yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai  $P_1$  yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin Kabupaten Wakatobi untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wakatobi harus terus-menerus ditingkatkan.

**Tabel 7.1 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Kabupaten Wakatobi, 2012 – 2017**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman ( $P_1$ )	Indeks Keparahan ( $P_2$ )
2012	198 229	1.68	0.25
2013	202 103	2.11	0.37
2014	206 570	1.42	0.17
2015	207 228	3.69	1.08
2016	234 351	2.85	0.76
2017	239 819	2.52	0.59

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi

Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode 2012 – 2017 nilai  $P_2$  mengalami peningkatan yaitu dari 0,25 di tahun 2012 menjadi 0,59 di tahun 2017. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Dengan catatan kondisi rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin melebar, hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan pendapatan lebih kepada kelompok penduduk tidak miskin. Sementara, kelompok penduduk miskin masih menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Disaat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

<https://waktupikab.bps.go.id>

# LAMPIRAN

## 1

## Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama (%), 2017				Jumlah
	≤ 16	17-18	19-20	21+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Buton	14.64	11.49	33.10	40.78	100,00
Muna	12.59	18.66	22.37	46.38	100,00
Konawe	20.36	23.89	23.20	32.55	100,00
Kolaka	20.17	20.48	25.80	33.56	100,00
Konawe Selatan	17.91	32.68	22.93	26.48	100,00
Bombana	24.02	25.76	21.27	28.95	100,00
Wakatobi	11.11	22.44	24.12	42.33	100,00
Kolaka Utara	24.57	23.92	21.21	30.30	100,00
Buton Utara	17.12	23.74	24.04	35.09	100,00
Konawe Utara	16.65	25.18	23.88	34.29	100,00
Kolaka Timur	19.45	24.69	23.68	32.17	100,00
Konawe Kepulauan	16.77	25.76	31.36	26.10	100,00
Kota Kendari	7.86	14.63	21.59	55.92	100,00
Kota Baubau	9.57	26.95	24.12	39.36	100,00
<b>Sulawesi Tenggara</b>	16.00	23.73	23.63	36.65	<b>100,00</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

## 2

## Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	67,23	67,30
Muna	69,77	69,77
Konawe	69,48	69,52
Kolaka	69,97	70,05
Konawe Selatan	69,93	69,98
Bombana	67,72	67,82
Wakatobi	69,54	69,59
Kolaka Utara	69,62	69,74
Buton Utara	70,37	70,38
Konawe Utara	68,64	68,69
Kolaka Timur	71,58	71,66
Konawe Kepulauan	67,87	67,88
Muna Barat	69,78	69,79
Buton Tengah	67,17	67,17
Buton Selatan	67,17	67,17
Kota Kendari	72,98	73,02
Kota Baubau	70,47	70,50
<b>SULAWESI TENGGERA</b>	<b>70,46</b>	<b>70,47</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenisnya (%), 2017				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	88.53	84.18	90.09	42.07	86.16
Muna	88.04	85.77	88.91	35.41	83.24
Konawe	95.92	94.05	93.64	68.15	93.36
Kolaka	87.41	82.03	83.10	47.85	76.28
Konawe Selatan	89.81	87.71	89.73	62.46	88.23
Bombana	85.17	81.49	84.82	59.73	82.08
Wakatobi	93.04	83.84	91.77	70.98	86.75
Kolaka Utara	82.52	79.65	80.05	57.97	73.00
Buton Utara	85.57	84.30	84.30	65.29	75.15
Konawe Utara	91.91	87.92	93.46	67.32	85.42
Kolaka Timur	90.82	86.60	90.82	60.38	89.57
Konawe Kepulauan	95.20	92.94	95.29	71.15	92.01
Kota Kendari	91.06	89.91	92.73	53.14	90.77
Kota Baubau	95.95	90.77	93.01	63.90	92.21
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>88.43</b>	<b>84.97</b>	<b>87.76</b>	<b>54.74</b>	<b>84.45</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

## 4

## Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir (%), 2017			
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lainnya	Dukun beranak/paraji
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	3.88	68.59	27.53	0.00
Muna	1.59	90.66	7.75	0.00
Konawe	15.46	72.32	12.22	0.00
Kolaka	16.71	67.35	14.63	1.31
Konawe Selatan	11.92	78.53	9.55	0.00
Bombana	18.24	69.31	10.98	1.47
Wakatobi	5.12	73.43	21.44	0.00
Kolaka Utara	22.38	64.37	10.41	2.84
Buton Utara	11.81	79.67	7.24	1.28
Konawe Utara	8.71	70.92	18.15	2.22
Kolaka Timur	17.90	79.98	2.12	0.00
Konawe Kepulauan	8.10	84.76	7,14	0.00
Kota Kendari	37.05	54.54	8.41	0.00
Kota Baubau	11.39	79.68	7.76	1.17
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>14.80</b>	<b>73.57</b>	<b>11.11</b>	<b>0.52</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tenggara (Tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	13,22	13,52
Muna	13,20	13,48
Konawe	12,96	12,97
Kolaka	12,37	12,38
Konawe Selatan	12,16	12,22
Bombana	11,80	11,81
Wakatobi	12,87	13,14
Kolaka Utara	11,92	11,93
Buton Utara	12,72	12,73
Konawe Utara	11,93	12,02
Kolaka Timur	11,33	11,58
Konawe Kepulauan	10,94	11,30
Muna Barat	11,64	12,06
Buton Tengah	12,31	12,32
Buton Selatan	12,54	12,55
Kota Kendari	16,05	16,06
Kota Baubau	14,78	14,79
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>13,24</b>	<b>13,36</b>

[Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara]

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Tenggara (Tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	7,06	7,22
Muna	7,66	7,89
Konawe	8,60	8,77
Kolaka	8,19	8,31
Konawe Selatan	7,71	7,72
Bombana	7,52	7,53
Wakatobi	7,70	7,71
Kolaka Utara	7,49	7,50
Buton Utara	7,92	8,18
Konawe Utara	8,41	8,62
Kolaka Timur	6,65	6,90
Konawe Kepulauan	8,80	8,90
Muna Barat	6,24	6,48
Buton Tengah	7,01	7,02
Buton Selatan	6,81	7,06
Kota Kendari	11,67	11,68
Kota Baubau	9,89	9,90
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>8,32</b>	<b>8,46</b>

[Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara]

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)							
	7-12		13-15		16-18		19-24	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	99,55	100,00	97,73	98,28	81,06	75,99	29,41	37,26
Muna	98,42	99,19	95,74	97,71	90,30	85,41	20,61	26,18
Konawe	99,34	99,67	90,61	91,14	70,77	68,66	24,58	22,68
Kolaka	98,92	99,83	95,54	94,49	63,80	62,22	25,94	20,94
Konawe Selatan	99,34	99,82	94,42	95,19	64,10	63,59	18,10	13,73
Bombana	98,94	100,00	85,69	86,68	64,18	63,36	13,80	12,42
Wakatobi	98,27	98,74	97,14	96,81	76,15	85,53	21,74	20,96
Kolaka Utara	100,00	100,00	85,09	87,07	55,60	60,31	24,64	17,84
Buton Utara	98,55	99,78	95,83	96,39	83,06	77,43	26,36	21,83
Konawe Utara	98,35	99,09	93,38	94,41	71,49	68,19	20,48	14,97
Kolaka Timur	100,00	100,00	94,62	95,51	69,59	66,69	22,29	26,32
Konawe Kepulauan	100,00	100,00	97,76	98,26	66,23	75,75	17,09	19,08
Muna Barat	-	100,00	-	88,81	-	83,17	-	14,83
Buton Tengah	-	90,25	-	95,50	-	91,55	-	25,23
Buton Selatan	-	100,00	-	96,22	-	52,63	-	29,28
Kota Kendari	99,69	100,00	94,46	94,07	94,46	77,72	51,70	57,90
Kota Baubau	99,80	100,00	96,68	95,72	96,68	83,16	20,88	28,77
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>99,28</b>	<b>99,32</b>	<b>93,94</b>	<b>94,08</b>	<b>72,67</b>	<b>72,94</b>	<b>29,31</b>	<b>30,03</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)							
	SD		SMP		SMA		Diploma ke Atas	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Buton	96,23	97,13	77,80	76,91	68,52	65,31	26,88	32,24
Muna	97,58	97,26	80,67	78,85	76,95	75,01	18,69	21,39
Konawe	98,16	97,67	71,57	73,81	68,02	65,58	22,65	22,37
Kolaka	98,30	98,76	67,85	70,12	54,43	58,00	21,87	18,14
Konawe Selatan	94,29	96,32	75,05	73,11	62,16	61,13	16,61	12,81
Bombana	92,61	95,62	73,82	74,61	57,46	54,41	10,28	8,31
Wakatobi	95,29	96,88	79,99	79,82	53,08	62,34	13,97	12,94
Kolaka Utara	97,29	100,00	75,48	73,44	46,71	49,01	20,66	16,27
Buton Utara	91,41	95,04	84,76	83,51	59,71	60,58	14,35	14,23
Konawe Utara	93,90	97,11	79,83	78,86	50,45	53,83	17,36	12,79
Kolaka Timur	94,13	94,36	74,81	78,02	66,95	61,62	20,03	24,98
Konawe Kepulauan	93,17	98,86	90,70	88,69	53,57	61,36	10,87	11,07
Muna Barat	-	96,35	-	80,23	-	68,77	-	3,86
Buton Tengah	-	87,72	-	85,21	-	84,32	-	23,44
Buton Selatan	-	100,00	-	84,80	-	50,95	-	20,47
Kota Kendari	97,49	96,41	67,82	69,56	54,99	56,53	51,29	55,62
Kota Baubau	99,80	98,22	85,56	85,61	71,47	73,42	19,41	28,69
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>96,27</b>	<b>96,62</b>	<b>75,54</b>	<b>76,49</b>	<b>62,63</b>	<b>62,71</b>	<b>26,99</b>	<b>27,21</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

TPAK dan TPT Wakatobi, 2017	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK (%)	73,31	53,09	64,88
TPT (%)	2,43	0,86	2,43

[Diolah dari Hasil Sakernas]

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Jenis Kelamin	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2017			Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Bukan Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	22.682	863	6561	30.243
Perempuan	18.135	157	16160	34.452
<b>Laki-laki+Perempuan</b>	<b>40.954</b>	<b>1.020</b>	<b>22.721</b>	<b>64.695</b>

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Wakatobi Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	9110	6239	15349
Pertambangan dan Penggalian	277	182	459
Industri Pengolahan	866	2095	2961
Konstruksi	2332	0	2332
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	2509	4429	6938
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	5463	5138	10601
Lainnya	2262	52	2314
<b>Jumlah</b>	<b>22819</b>	<b>18135</b>	<b>40954</b>

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m <sup>2</sup> ), 2017					Jumlah
	≤19	20-49	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	2,05	33,19	42,55	18,16	4,06	100,00
Muna	1,21	30,80	48,76	13,23	5,99	100,00
Konawe	1,61	16,02	46,44	24,87	11,06	100,00
Kolaka	2,11	27,02	49,82	12,63	8,41	100,00
Konawe Selatan	0,52	23,83	53,57	15,57	6,51	100,00
Bombana	2,78	38,82	37,95	13,14	7,30	100,00
Wakatobi	1,16	20,72	53,23	18,61	6,28	100,00
Kolaka Utara	1,55	33,05	38,30	16,14	10,97	100,00
Buton Utara	1,45	41,68	41,79	10,22	4,86	100,00
Konawe Utara	0,32	21,63	49,62	18,21	10,21	100,00
Kolaka Timur	0,19	22,99	42,11	17,91	16,81	100,00
Konawe Kepulauan	0,47	22,81	56,00	16,32	4,39	100,00
Kota Kendari	17,11	22,95	29,23	14,28	16,44	100,00
Kota Baubau	9,10	28,31	43,26	10,46	8,86	100,00
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>4,07</b>	<b>27,69</b>	<b>43,59</b>	<b>15,52</b>	<b>9,13</b>	<b>100,00</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2017					
	Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	89,12	1,88	8,41	0,59	0,00	100,00
Muna	89,05	1,16	9,54	0,24	0,00	100,00
Konawe	90,50	3,53	5,97	0,00	0,00	100,00
Kolaka	81,81	3,86	8,68	5,36	0,29	100,00
Konawe Selatan	94,02	0,29	5,43	0,25	0,00	100,00
Bombana	92,27	2,59	4,66	0,48	0,00	100,00
Wakatobi	92,01	1,57	6,14	0,29	0,00	100,00
Kolaka Utara	85,11	3,93	10,18	0,66	0,12	100,00
Buton Utara	93,96	2,51	3,03	0,51	0,00	100,00
Konawe Utara	92,34	1,71	5,24	0,72	0,00	100,00
Kolaka Timur	91,83	2,66	4,17	1,34	0,00	100,00
Konawe Kepulauan	92,46	2,71	4,64	0,19	0,00	100,00
Kota Kendari	66,91	24,35	7,66	1,08	0,00	100,00
Kota Baubau	65,01	12,51	21,62	0,85	0,00	100,00
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>84,78</b>	<b>6,22</b>	<b>8,06</b>	<b>0,91</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	13,03	13,41	13,53	13,46	209.245	211.485
Muna	32,65	32,35	15,37	14,85	289.049	296.383
Konawe	38,14	37,99	16,09	15,65	260.264	267.331
Kolaka	28,56	26,64	15,05	13,78	320.897	327.329
Konawe Selatan	33,94	33,73	11,36	11,14	195.175	200.663
Bombana	22,04	21,52	13,06	12,36	266.717	270.627
Wakatobi	15,73	15,49	16,46	16,19	234.351	239.819
Kolaka Utara	24,32	23,42	17,11	16,24	388.041	406.334
Buton Utara	9,60	9,64	15,78	15,58	275.544	280.974
Konawe Utara	5,79	8,44	9,75	13,93	232.307	244.391
Kolaka Timur	28,52	28,86	15,71	15,64	314.387	323.956
Konawe Kepulauan	5,70	5,97	17,72	18,10	263.229	271.241
Muna Barat	12,32	12,89	-	16,24	-	297.787
Buton Tengah	12,33	16,73	-	18,35	-	220.897
Buton Selatan	10,75	12,66	-	15,99	-	213.869
Kota Kendari	19,58	18,44	5,51	5,01	291.069	301.894
Kota Baubau	13,87	13,55	8,81	8,39	291.873	297.991
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>321,88</b>	<b>326,87</b>	<b>12,90</b>	<b>12,88</b>	<b>257.553</b>	<b>277.288</b>

[Diolah dari Hasil Susenas]

<https://wartatobikab.bps.go.id>

Sengaja Dikosongkan

## SUMBER DATA

### Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

### Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan

bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

### **Survei Angkatan Kerja Nasional**

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

### **Sumber Data Lainnya**

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi kementerian/ Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.